



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 10 Januari 2020

Kepada Yth. Saudara,

1. Kepala OPD Se-Kabupaten Pesisir Selatan
2. Para Camat Se-Kabupaten Pesisir Selatan
3. Wali Nagari Se-Kabupaten Pesisir selatan

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 360 / 08 / BPBD-PS / I / 2020

TENTANG

PERINGATAN DINI POTENSI ANCAMAN BAHAYA BANJIR, BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI PESISIR SELATAN


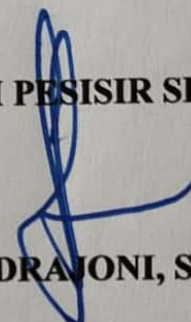
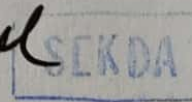
Menindak lanjuti surat dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B-02/DII/PD.03.02/01/2020 tanggal 06 Januari 2020, Perihal Peringatan Dini Potensi Ancaman Bahaya Banjir, Banjir bandang dan Tanah Longsor di Indonesia. Berdasarkan Kejadian Bencana hidrometeorologis yang melanda sejumlah titik di Wilayah Jabodetabek, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat awal Tahun 2020 serta menindak lanjuti hasil Rakor Penanganan Banjir di Jabodetabek tanggal 02 Januari 2020.


Untuk mencegah meluasnya dampak kejadian yang ditimbulkan akibat kejadian yang disebabkan oleh curah hujan ekstrim, kami harapkan Saudara di Jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan hal sebagai berikut :

1. Mengantisipasi timbulnya dampak bencana akibat tingginya curah hujan seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor dengan melakukan aksi penguatan kesiapsiagaan dan peringatan dini, seperti melakukan pengecekan atau inspeksi sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya banjir seperti saluran air, pompa, tanggul-tanggul kritis, pintu air serta melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat;
2. Berkoordinasi dengan TNI/Polri, Dinas terkait dan Tokoh Masyarakat bersama *stakeholder* lainnya untuk mendapatkan informasi dan melakukan penyebaran informasi peringatan dini bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor sampai kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah berisiko tinggi;

3. Mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan dan peringatan dini bersama masyarakat menghadapi ancaman bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor di daerah masing-masing dengan menyiapkan sumber daya dan sistem informasi daerah terutama pada daerah berkumpulnya masyarakat seperti tempat wisata, rumah sakit, pasar dan fasilitas umum lainnya;
4. Untuk Nagari yang belum membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) agar segera membentuk KSB dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dimana KSB merupakan salah satu elemen dalam penguatan mitigasi bencana.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

 **BUPATI PESISIR SELATAN**  

 **H. HENDRAJONI, S.H., M.H.**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Peringgal.